



BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 331 / XII /TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
KECAMATAN WOTU KABUPATEN LUWU TIMUR

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Dokumen Standar Operasional Prosedur Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
  2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 569);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 52).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KECAMATAN WOTU KABUPATEN LUWU TIMUR.

**KESATU :** Penetapan Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

**KEDUA :** Dokumen SOP sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagai acuan dan harus dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;

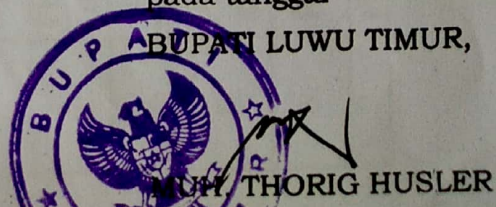
**KETIGA :** Dokumen SOP sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu apabila ingin melakukan revisi SOP sepanjang tidak merubah judul, maka penetapan dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk dan atas nama Bupati;

**KEEMPAT :** Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili

pada tanggal 28 Desember 2018

BUPATI LUWU TIMUR,



LAMPIRAN  
SURAT KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 331 / XII / TAHUN 2018  
TENTANG  
PENETAPAN DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
KECAMATAN WOTU KABUPATEN LUWU TIMUR

DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KECAMATAN WOTU KABUPATEN LUWU TIMUR

NO	NAMA SOP	TANGGAL PEMBUATAN	NOMOR SOP	KETERANGAN
1.	PENANGANAN SURAT MASUK	4 SEPTEMBER 2018	01	SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
2.	PENANGANAN SURAT KELUAR	4 SEPTEMBER 2018	02	SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
3.	PEMBUATAN SURAT UNDANGAN	4 SEPTEMBER 2018	03	SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
4.	PENANGANAN SURAT TUGAS	4 SEPTEMBER 2018	04	SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
5.	PEMBUATAN SURAT KEPUTUSAN	4 SEPTEMBER 2018	05	SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
6.	PENANGANAN KEARSIPAN	4 SEPTEMBER 2018	06	SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
7.	PENGAJUAN NOTA DINAS	4 SEPTEMBER 2018	07	SUB BAGIAN UMUM DAN



				KEUANGAN
8.	PENGAJUAN PANJAR	4 SEPTEMBER 2018	08	SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
9.	PENERBITAN SURAT PERINTAH PEMBAYARAN (SPM)	4 SEPTEMBER 2018	09	SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
10.	PELAPORAN ASET	4 SEPTEMBER 2018	10	SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
11.	VERIFIKASI SPJ KEUANGAN	4 SEPTEMBER 2018	11	SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
12.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN	4 SEPTEMBER 2018	12	SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
13.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN	4 SEPTEMBER 2018	13	SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
14.	PENGAJUAN SPP	4 SEPTEMBER 2018	14	SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
15.	PEMBAYARAN GAJI PNS	4 SEPTEMBER 2018	15	SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
16.	PENGAJUAN SPD	4 SEPTEMBER 2018	16	SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
17.	PENYUSUNAN KP4	4 SEPTEMBER 2018	17	SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN
18.	PENGUSULAN KGB	4 SEPTEMBER 2018	18	SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN

19.	PERMOHONAN SURAT IZIN CUTI	4 SEPTEMBER 2018	19	SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN
20.	PPENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT	4 SEPTEMBER 2018	20	SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN
21.	PENYUSUNAN SKP	4 SEPTEMBER 2018	21	SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN
22.	PENGURUSAN PENSIUN	4 SEPTEMBER 2018	22	SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN
23.	PENYUSUNAN RENJA	4 SEPTEMBER 2018	23	SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN
24.	PENYUSUNAN RENSTRA	4 SEPTEMBER 2018	24	SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN
25.	PENYUSUNAN RKA	4 SEPTEMBER 2018	25	SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN
26.	PENYUSUNAN LAPORAN INSTANSI PEMERINTAH	4 SEPTEMBER 2018	26	SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN
27.	PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN	4 SEPTEMBER 2018	27	SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN



				KEPEGAWAIAN
28.	PEMBUATAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN	4 SEPTEMBER 2018	28	SEKSI PELAYANAN UMUM
29.	PEMBUATAN SURAT IZIN MIKRO DAN KECIL	4 SEPTEMBER 2018	29	SEKSI PELAYANAN UMUM
30.	PELAYANAN PERMOHONAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4 SEPTEMBER 2018	30	SEKSI PELAYANAN UMUM
31.	PEMBUATAN AKTE JUAL BELI TANAH	4 SEPTEMBER 2018	31	SEKSI PEMERINTAHAN UMUM
32.	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	4 SEPTEMBER 2018	32	SEKSI PEMERINTAHAN UMUM
33.	RAPAT KOORDINASI	4 SEPTEMBER 2018	33	SEKSI PEMERINTAHAN UMUM
34.	LAPORAN KEJADIAN	4 SEPTEMBER 2018	34	SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
35.	MEDIASI KASUS TANAH	4 SEPTEMBER 2018	35	SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
36.	SURAT REKOMENDASI PENCAIRAN DANA DESA	4 SEPTEMBER 2018	36	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
37.	FASILITASI DAN PENDAMPINGAN ASPIRASI MASYARAKAT DESA DALAM MUSREMBANG	4 SEPTEMBER 2018	37	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

38.	PENYELENGGARAAN FASILITASI DAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDes	4 SEPTEMBER 2018	38	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
-----	--	------------------	----	---------------------------------------



BUPATI LUWU TIMUR,

MUH. THORIG HUSLER